

PENOLAKAN GREENPEACE TERHADAP KEBIJAKAN *FOOD ESTATE* DI KALIMANTAN TENGAH 2020-2023

Oleh : Muhammad Sultan Arief
Pembimbing: Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Indonesian government, through Presidential Regulation No. 109/2020, launched the Food Estate project as one of the parts of the National Strategic Projects (PSN) for the 2020-2024 period. There are two Food Estate schemes in Central Kalimantan, covering Gunung Mas Regency, Pulang Pisau Regency, and Kapuas Regency. In its implementation, the Food Estate faced rejection from several parties due to the negative impacts it caused, including environmental damage, conflicts with indigenous communities, and socio-economic unsustainability. Greenpeace, as an international organization focusing on the environment, collaborated with local organizations and legal aid institutions to reject and expose the negative impacts of the Food Estate project in Central Kalimantan.

The research method used is qualitative, with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with Greenpeace Indonesia. This study uses a Constructivist perspective to explain that international actors act based on the norms and identities they adhere to. The Non-Governmental Organization theory is used to analyze the implementation of Greenpeace's role as an NGO in assisting the rejection of the Food Estate in Central Kalimantan.

The results of this study provide an understanding of Greenpeace's efforts in conducting rejection actions and revealing the negative impacts of the Food Estate project in Central Kalimantan. The research findings show that Greenpeace has carried out its Advocacy and Operational functions to reject Food Estate activities since 2020-2023

Keywords: Food Estate, Greenpeace, NGO, Indonesia

PENDAHULUAN

Pertanian berkelanjutan dan keberlanjutan lingkungan merupakan dua isu yang semakin mendapatkan perhatian di dunia saat ini.¹ Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengembangkan konsep Food Estate atau lahan pertanian terpadu untuk meningkatkan produksi pangan dan ketahanan nasional. Namun, rencana pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan seperti Greenpeace. *Food Estate* di Kalimantan Tengah dipilih karena wilayah ini memiliki potensi lahan yang luas dan subur yang dianggap cocok untuk pengembangan pertanian besar-besaran.

Sejak penerbitan Perpres No. 109/2020 sudah ada dua rencana lumbung pangan baru sedang berjalan di Kalimantan Tengah: Pertama adalah rencana Kementerian Pertahanan untuk 32.000 hektar perkebunan singkong di Kabupaten Gunung Mas. Kedua, proyek lumbung pangan Kementerian Pertanian, terutama rencana penanaman padi di lahan rawa seluas 165.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.²

Pada pelaksanaan program Food Estate masih banyak penolakan yang dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya datang dari masyarakat sekitar. Pertentangan *Food Estate* ini dilakukan oleh berbagai pihak karena adanya perkiraan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat lokal, dan pelanggaran hak masyarakat adat.

Berikut alasan penolakan *Food Estate*:³

1. Dampak Lingkungan: Pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah melibatkan penggundulan hutan dan konversi lahan gambut yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Deforestasi dan degradasi habitat yang diakibatkan oleh *Food Estate* dapat menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati dan merusak ekosistem alami. Selain itu, konversi lahan gambut juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan pelepasan gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim.

¹ Lagiman. (2020). *Pertanian Berkelanjutan: Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Hal 365-366.

² Kariyasa, Ketut. (2020). *Grand Design Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani Di Lahan Rawa*

Kalimantan Tengah. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Hal 54.

³ Andriansyah, Anugrah. (10 November 2022). *Aktivis Lingkungan Kritik Proyek Lumbung Pangan Kalteng*. [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-lingkungan-kritik-proyek-lumbung-pangan-kalteng/6828274.html>.

2. Konflik dengan Masyarakat Adat: *Food Estate* di Kalimantan Tengah juga menimbulkan konflik dengan masyarakat adat yang telah lama menghuni dan mengelola wilayah tersebut.
3. Ketidakberlanjutan Sosial-Ekonomi: Pengembangan pertanian besar-besaran tersebut dapat menghilangkan mata pencaharian tradisional masyarakat lokal, seperti berburu, berkebun, dan berladang kecil-kecilan, yang telah menjadi bagian dari kehidupan dan keberlanjutan mereka.

Senior Campaigner Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa adanya penerbitan Permen LHK No. 24/2020 tentang penggunaan hutan lindung, hutan adat, dan hutan produksi dalam pembangunan proyek *Food Estate* menjadi alasan terbesar Greenpeace sebagai NGO yang berfokus pada kelestarian alam untuk menolakan kebijakan *Food Estate*,⁴ dan melihat kenyataan dampak negatif yang ditimbulkan dari program tersebut Greenpeace memiliki peran yang signifikan dalam penolakan terhadap rencana *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Organisasi ini telah lama berjuang untuk melindungi hutan tropis dan keanekaragaman hayati di Indonesia, termasuk memperjuangkan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.

⁴ Hasil wawancara bersama narasumber.

KERANGKA TEORI Perspektif Konstruktivisme

Konstruktivis mempercayai bahwa hubungan antara negara-negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau kepentingan ekonomi semata, tetapi juga oleh konstruksi sosial seperti norma-norma keamanan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Konstruktivis berpendapat bahwa norma-norma ini dipengaruhi oleh aktor-aktor sosial, termasuk negara-negara, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil, serta dapat berubah seiring waktu melalui interaksi dan interpretasi bersama.

Studi oleh Alexander Wendt merupakan salah satu karya klasik dalam perspektif konstruktivisme. Dalam artikel tersebut, Wendt mengemukakan bahwa "struktur dalam hubungan internasional tidak terlepas dari peran ide dan konstruksi sosial yang dimiliki oleh aktor-aktor dalam sistem tersebut."⁵

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan perspektif konstruktivisme yang menjelaskan bahwa peran tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarnegara, Hal ini juga terkait dengan hubungan transnasional, yaitu hubungan antara individu, kelompok, dan organisasi dari berbagai negara yang bertujuan menciptakan hubungan yang lebih kooperatif. Penolakan yang dilakukan Greenpeace merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk bekerjasama dalam membantu

⁵ Wendt, Alexander. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press. Hal. 391.

menyelesaikan permasalahan yang tidak hanya dirasakan di satu negara.

Tingkat Analisa: *Domestic level analysis* (Kelompok)

Dari beberapa contoh tingkat analisis yang dijelaskan oleh Joshua S. Goldstein, penulis menggunakan tingkat analisis kelompok atau domestik. Tingkat analisis kelompok dijelaskan sebagai analisa yang berkaitan dengan kumpulan individu atau kelompok dalam suatu negara yang memengaruhi tindakan negara dalam arena internasional. Kumpulan-kumpulan tersebut mencakup kelompok kepentingan, organisasi politik, dan lembaga pemerintah. Kelompok-kelompok ini beroperasi dengan cara yang berbeda (dengan efek internasional yang berbeda) dalam jenis masyarakat dan negara yang berbeda.⁶ Penulis berupaya untuk menjelaskan fungsi dari organisasi internasional yang bergerak pada bidang kelestarian lingkungan, yaitu Greenpeace.

Teori *Non-governmental Organization* (NGO)

Organisasi internasional dalam konteks hubungan internasional secara umum dipisahkan menjadi Intergovernmental Organization (IGO) dan Non-Governmental Organization (NGO). IGO terbentuk dari adanya perjanjian antara dua atau lebih negara berdaulat yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan biasanya memiliki struktur yang diatur oleh perjanjian

⁶ Joshua S. Goldstein dan Jon C Pevehouse, "*International Relations*", 10th ed. (Pearson, 2014), hal.17.

internasional atau konvensi, sementara NGO tidak dioperasikan atau dikendalikan oleh pemerintah suatu negara, NGO terbentuk dari individu, kelompok masyarakat sipil, atau entitas non-pemerintah lainnya yang berfokus pada berbagai isu global, seperti hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, pendidikan, atau bantuan kemanusiaan. NGO tidak memiliki kekuasaan formal dalam sistem internasional, tetapi mereka dapat memengaruhi kebijakan dan membantu dalam pelaksanaan program-program di tingkat internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Greenpeace sebagai subjek penelitian ini tergolong pada kelompok NGO.⁷

Fungsi NGO menurut Lewis dan Kanji adalah:⁸

1. Fungsi Operasional: NGO memiliki peranan dalam operasional, itu berarti NGO terkait dengan merancang dan melaksanakan program aksi konkret yang secara langsung menghasilkan perubahan kondisi orang atau lingkungan alam, misalnya pembangunan, bantuan pangan, perawatan Kesehatan, perlindungan bangunan bersejarah, perlindungan Kesehatan hewan, konservasi alam, dan lain-lain.
2. Fungsi Advokasi: NGO memiliki peranan dalam

⁷ Hurwits, Leon dkk. (2001). *International Organization a Comparative Approach*. (New York: Praeger Publisher). Hal. 29.

⁸ Lewis, Davis dan Kanji, Nazneen. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development*. (New York: Routledge). Hal. 68.

advokasi, itu berarti NGO bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, kebijakan, dan praktik otoritas nasional dan internasional pemerintah, kelompok sosial, badan usaha, dan masyarakat umum. Walaupun mereka tidak bisa langsung berorientasi pada perubahan kondisi realitas, namun mereka dapat melakukan dengan cara mempengaruhi perantaranya.

Teori NGO dalam hal ini menekankan pada adanya kekosongan dalam tindakan negara dan peran organisasi non-pemerintah sebagai penyeimbang atau pelengkap dalam upaya mengatasi isu-isu global. Greenpeace, sebagai salah satu NGO terkemuka di bidang lingkungan memainkan peran penting dalam mengidentifikasi masalah lingkungan, memperjuangkan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan, serta memengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan rencana *Food Estate* yang ada di Kalimantan Tengah.

Dalam aksi politik, kelompok aktivis memiliki tujuan untuk mengubah institusi, sikap, dan peraturan. Mereka didorong oleh keyakinan bahwa keadilan dan integritas sosial, politik, sumber daya, dan ekonomi tidak dapat diabaikan. Motivasi ini mendorong mereka untuk menentang kebijakan yang tidak adil dan untuk memperjuangkan hak asasi manusia yang terpinggirkan. Kelompok aktivis ini menciptakan keseimbangan antara negara dan masyarakat.

Pada kesimpulannya, kehadiran NGO dalam aksi politik membantu menciptakan keseimbangan antara negara dan masyarakat sipil. Mereka berfungsi sebagai pengawas, advokat, dan jembatan antara kepentingan publik dan negara. Tujuan utama mereka adalah melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa keadilan dan integritas sosial, politik, sumber daya, dan ekonomi tidak diabaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Advokasi Greenpeace Dalam aksi penolakan kebijakan *Food Estate* di Kalimantan Tengah

Greenpeace, sebagai organisasi non-pemerintah (NGO), mengemban fungsi advokasi dalam aksi penolakan proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah dengan merujuk pada teori Non-Governmental Organization (NGO) oleh Lewis dan Kanji. Melalui pendekatan ini, Greenpeace berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek tersebut.⁹ Sebagai contoh, Kampanye dan aksi langsung Greenpeace terhadap penolakan *Food Estate* di Kalimantan Tengah yang mencerminkan upaya yang gigih dan strategis dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan dan masyarakat lokal.¹⁰

⁹ David Lewis dan Nazneen Kanji. (2009). *Non-Governmental Organization and Development*. New York: Routledge

¹⁰ Greenpeace Indonesia. (10 November 2022). *Pemerintah Indonesia Hanya Memberi Makan Krisis Iklim Lewat Food Estate*. [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran>

Greenpeace melakukan penelitian mendalam untuk mengumpulkan data ilmiah yang mendukung argumen mereka terkait dampak lingkungan dan sosial proyek *Food Estate*. Kampanye edukasi yang mereka luncurkan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang terkait dengan proyek tersebut. Greenpeace juga aktif berkomunikasi dengan pihak berwenang, termasuk pemerintah lokal dan nasional, untuk menyuarakan kekhawatiran dan mendorong adopsi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, Greenpeace memainkan peran penting sebagai agen perubahan yang berupaya memberikan pengaruh pada kebijakan dan praktik-praktik yang dapat berdampak pada ekosistem dan keberlanjutan di Kalimantan Tengah.

Greenpeace juga melakukan aksi langsung sebagai bagian dari strategi mereka untuk menolak kebijakan *Food Estate*. Salah satu aksi langsung yang paling mencolok adalah aksi penyusupan ke lokasi proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Dalam aksi ini, para aktivis Greenpeace memasuki area proyek secara ilegal untuk memasang spanduk protes dan memblokir kegiatan proyek. Aksi ini dilakukan sebagai upaya untuk menarik perhatian publik dan media, serta untuk memaksa pemerintah dan perusahaan terkait untuk mendengarkan tuntutan Greenpeace.¹¹

pers/55727/pemerintah-indonesia-hanya-memberi-makan-krisis-iklim-lewat-food-estate/.

¹¹ Linda Novi Trianita. "Greenpeace Temukan Proyek Food Estate Prabowo Kalimantan Tengah Gagal" [Halaman Web].

Greenpeace berperan dalam menyusun laporan lengkap dan hasil temuan terkait dengan kegiatan *Food Estate* yang dilakukan di Kalimantan Tengah, termasuk luas lahan yang digunakan, dampak yang terjadi akibat dari pembukaan lahan tersebut dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan. Laporan ini dapat dipublikasikan dan disebarluaskan kepada media, masyarakat, pemerintah, dan organisasi lingkungan lainnya untuk mendapatkan perhatian dan dukungan lebih lanjut.¹²

Greenpeace dalam fungsi advokasi juga memiliki peranan dalam mengajak organisasi lingkungan maupun media lainnya untuk membangun koalisi dan berkoordinasi dalam mengadvokasi aktivitas *Food Estate*. Melalui kerja sama ini, mereka dapat meningkatkan visibilitas kasus tersebut dalam mengkampanyekan tindakan konkrit, seperti meminta pertanggungjawaban pembukaan lahan dan dampak kerusakan alam yang dilakukan kepada pemerintah akibat aktivitas *Food Estate*.

Greenpeace turut membangun kerja sama dengan mengajak media massa dan organisasi yang memiliki pandangan yang sama, di antaranya media massa seperti TEMPO, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti WALHI, Save Our Borneo, dan LBH Palangkaraya.¹³ Greenpeace membangun empati dan simpati melalui media massa yang

Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1777530/greenpeace-temukan-proyek-food-estate-prabowo-di-kalimantan-tengah-gagal>.

¹² Hasil wawancara bersama narasumber.

¹³ *Ibid.*

ditujukan kepada organisasi internasional terkhusus organisasi hak asasi manusia untuk memberikan dukungan dan ikut serta dalam mengkampanyekan suara atas kasus kegagalan *Food Estate*.

Fungsi Operasional Greenpeace dalam aksi penolakan kebijakan *Food Estate* di Kalimantan Tengah

Greenpeace memainkan peran penting dengan menyediakan bantuan materiil dan dukungan pada masyarakat setempat, memberikan kontribusi tidak hanya dalam pengumpulan bukti tetapi juga dalam penyusunan laporan yang mendalam. Sebagai organisasi non-pemerintah, Greenpeace tidak hanya terbatas pada aspek teknis, melainkan juga memberikan dukungan emosional dan moral kepada masyarakat yang merasakan dampak langsung dari pembukaan lahan untuk *Food Estate* di Kalimantan Tengah.¹⁴

Masyarakat setempat, seringkali, merasakan tekanan ekonomi dan lingkungan yang signifikan akibat proyek ini, dan Greenpeace hadir untuk mendukung mereka dalam melawan dampak tersebut. Masyarakat sekitar kawasan *Food Estate* kini merasakan sedikit ketenangan dengan keberadaan Greenpeace dan beberapa pihak lainnya sebagai ‘teman’ dalam memperjuangkan hak mereka atas sumber daya alam di Kalimantan Tengah. Greenpeace secara rutin mengumpulkan bukti-bukti dan menyusun laporan yang mendokumentasikan secara menyeluruh aktivitas *Food Estate*. Hal ini mencakup analisis mengenai jumlah lahan yang telah dibuka,

dampak terhadap ekosistem, dan konsekuensi sosial bagi masyarakat lokal. Laporan-laporan ini kemudian menjadi landasan yang kuat untuk mendukung kampanye advokasi Greenpeace, memperkuat argumen mereka melalui data dan fakta yang terverifikasi.

Hasil Peranan Greenpeace sebagai NGO terhadap Aktivitas *Food Estate*

1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan aktivitas *Food Estate*

Berdasarkan penjabaran akan fungsi dan peranan dari Greenpeace atas aktivitas *Food Estate* di Kalimantan Tengah, kampanye dan kegiatan yang dilakukan oleh Greenpeace tersebut pada nyatanya meningkatkan kesadaran masyarakat, baik masyarakat setempat di Kalimantan Tengah maupun masyarakat di luar Kalimantan Tengah seperti di Indonesia secara keseluruhan tentang aktivitas *Food Estate* maupun lingkungan dengan menyebarkan informasi, mengedukasi, dan membangkitkan kesadaran publik, kampanye tersebut membantu mengubah pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu tersebut.

2. Temuan Greenpeace terhadap aktivitas *Food Estate*

Atas hasil riset dan penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace ditemukan beberapa alasan kuat atas kegagalan *Food Estate* diantaranya ketidaksesuaian jenis tanah dengan jenis tanaman yang akan ditanam, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam melakukan riset pra-

¹⁴ *Ibid.*

tanam, kemudian ketidaksiapan anggaran dana untuk memulai proyek *Food Estate* sejak era covid tahun 2020.

Greenpeace juga menemukan keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam hal ini pengerahan TNI untuk menjaga wilayah kawasan *Food Estate* menjadi kejanggalaan tersendiri dimana proyek ini seharusnya hanya ditanggjawab oleh Kementerian Pertanian tanpa harus melibatkan aparat sipil, dengan adanya penjagaan ini masyarakat dan siapapun yang tidak memiliki izin dilarang menginjakkan kaki ke dalam kawasan tersebut.

Temuan selanjutnya adalah *Food Estate* Kalimantan Tengah mengakibatkan banjir di beberapa lokasi dan menimbulkan beberapa lubang genangan air yang cukup dalam akibat kurangnya analisis dampak lingkungan (amdal) yang dilakukan oleh pemerintah sebelum melakukan pembukaan lahan.

Temuan terakhir terkait pelaksanaan proyek *Food Estate* yang terkesan terburu-buru, dengan penerbitan Perpres No. 109 pada akhir 2020 menunjukkan bahwa pemerintah lebih mementingkan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga hasilnya dapat dinikmati daripada penanganan wabah Covid-19 yang melanda pada saat itu. Jika melihat pernyataan *World Food Programme* (WFP) pada April 2020 Indonesia tidak termasuk kedalam kategori rawan ketahanan pangan, maka seharusnya pemerintah Indonesia lebih fokus terhadap penanganan wabah Covid-19 dibandingkan memulai mega proyek yang terkesan tergesa-gesa dan

membutuhkan waktu dan dana yang sangat banyak.

Tantangan Greenpeace dalam Menolak Aktivitas *Food Estate* di Kalimantan Tengah

Tantangan pertama yang dihadapi oleh Greenpeace adalah resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik kuat terkait proyek *Food Estate*.¹⁵ Sumber daya finansial yang besar dan pengaruh politik dari pihak yang mendukung proyek tersebut dapat menciptakan hambatan serius dalam upaya Greenpeace untuk mengubah arah kebijakan. Greenpeace sudah berusaha berkali-kali mengirim surat untuk melaksanakan mediasi kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian selaku penanggungjawab atas proyek *Food Estate* di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau terkait proyek ini namun tidak kunjung mendapatkan surat balasan hingga saat ini. Menanggapi tantangan ini, Greenpeace memobilisasi dukungan dari masyarakat dan pihak berkepentingan yang sejalan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Hal ini memerlukan pendekatan persuasif, pendidikan, dan kampanye yang dapat membangun kesadaran masyarakat terkait dampak negatif proyek *Food Estate*. Greenpeace dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok lokal dan

¹⁵ Annasa Rizki Kamalina. *Greenpeace Sebut Program Food Estate Mangkrak Hingga Picu Perubahan Iklim*. [Halaman Web]. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221113/12/1597578/greenpeace-sebut-program-food-estate-mangkrak-hingga-picu-perubahan-iklim>.

internasional yang memiliki kepentingan serupa untuk memperkuat kampanye mereka.

Tantangan kedua yang dihadapi Greenpeace adalah bagaimana mengatasi persepsi masyarakat terhadap manfaat ekonomi segera yang dapat dihasilkan oleh proyek *Food Estate*.¹⁶ Greenpeace juga menghadapi perlawanan terhadap narasi pemerintah yang melihat *Food Estate* sebagai solusi untuk meningkatkan produksi pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Greenpeace perlu merancang kampanye yang tidak hanya menyoroti risiko dan dampak negatif proyek tersebut tetapi juga menyajikan alternatif berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan lingkungan.

SIMPULAN

Peran Advokasi dan Operasional yang telah dilaksanakan Greenpeace tidak lepas dari tujuan terbentuknya organisasi tersebut yaitu sebagai NGO lingkungan yang aktif melakukan kampanye untuk merubah mindset masyarakat global terhadap lingkungannya secara jangka panjang dan pendek. Artinya, Greenpeace bukanlah pemegang otoritas yang dapat merubah suatu kebijakan, namun dapat mendorong agar terpengaruhnya kebijakan suatu

negara terhadap lingkungan. Peran Greenpeace dikatakan efektif, karena meskipun secara resmi pembangunan *Food Estate* di Kalimantan Tengah belum dihentikan, namun peran-peran nya sudah dilakukan.

Dengan temuan dan hasil riset yang dilakukan Greenpeace, diharapkan dapat membuka wawasan pembaca akan kerusakan alam dan kerugian masyarakat yang dirasakan saat ini dan tidak menutup kemungkinan adanya dampak negatif jangka panjang akibat proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Greenpeace juga menyatakan akan terus melakukan perjuangan atas penolakan *Food Estate* di Kalimantan Tengah hingga memunculkan solusi dari mega proyek *Food Estate* yang akan berdampak positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan.

Greenpeace sebagai NGO juga dapat disimpulkan berhasil bersaing dengan aktor negara yakni Indonesia, sejauh ini dengan berhasil melaksanakan kedua peran yakni Advokasi dan Operasional berdasarkan teori Peran NGO oleh Lewis dan Kanji, Greenpeace akan terus melakukan riset untuk menemukan hal-hal lain yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat atas pembangunan proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Penolakam Greenpeace terhadap kebijakan *Food Estate* di Kalimantan Tengah tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa peran Green Peace sebagai Non-Governmental Organization (NGO) telah efektif sesuai dengan teori yang penulis pakai dari Lewis dan Kanji bahwa seharusnya NGO memiliki 2 peran yaitu advokasi dan operasional,

¹⁶ Ghita Intan. *Aktivis Lingkungan Temukan Jagung di Lahan Food Estate Hanya Ditanam di Polybag*. [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-lingkungan-temukan-jagung-dilahan-food-estate-hanya-ditanam-di-polybag/7410572.html>.

keduanya telah diperankan oleh Greenpeace dalam upaya penolakannya terhadap proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, Anugrah. (10 November 2022). *Aktivis Lingkungan Kritik Proyek Lumbung Pangan Kalteng*. [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-lingkungan-kritik-proyek-lumbung-pangan-kalteng/6828274.html>.
- Annasa Rizki Kamalina. *Greenpeace Sebut Program Food Estate Mangkrak Hingga Picu Perubahan Iklim*. [Halaman Web]. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221113/12/1597578/greenpeace-sebut-program-food-estate-mangkrak-hingga-picu-perubahan-iklim>.
- David Lewis dan Nazneen Kanji. (2009). *Non-Governmental Organization and Development*. New York: Routledge
- Greenpeace Indonesia. (10 November 2022). *Pemerintah Indonesia Hanya Memberi Makan Krisis Iklim Lewat Food Estate*. [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaranpers/55727/pemerintah-indonesia-di-polybag>. [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-lingkungan-temukan-jagung-dilahan-food-estate-hanya-ditanam-di-polybag/7410572.html>.
- Hurwits, Leon dkk. (2001). *International Organization a Comparative Approach*. (New York: Praeger Publisher). Hal. 29.
- Joshua S. Goldstein dan Jon C Pevehouse, *International Relations, 10th ed.* (Pearson, 2014), hal.17.
- Kariyasa, Ketut. (2020). *Grand Design Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani Di Lahan Rawa Kalimantan Tengah*. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Hal 54.
- Lagiman. (2020). *Pertanian Berkelanjutan: Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Hal 365-366.
- Linda Novi Trianita. *Greenpeace Temukan Proyek Food Estate Prabowo Kalimantan Tengah Gagal*. [Halaman Web]. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1777530/greenpeace-temukan-proyek-food-estate-prabowo-di-kalimantan-tengah-gagal>.

Wendt, Alexander. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press. Hal. 391. Jackson, Robert, & Georg Sørensen. *Introduction to International Relations Theories and Approaches*. 5th

ed. Oxford University Press, 2013.

Wawancara

Fitra, Syahrul. 13 Desember 2023. Senior Forest Campaigner Greenpeace Indonesia.